

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten di Indonesia menghadapi tuntutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah mulai dari perkotaan maupun kabupaten untuk mengendalikan, mengurus dan mengatur sendiri masing-masing kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor pertimbangan yaitu diasumsikan daerah lebih memahami dan mengerti keperluan masyarakat di daerah masing-masing, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan adanya otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat secara mandiri untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih memahami tentang potensi dan kebutuhan dari masyarakat (Amalia & Pratiwi, 2022).

Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberi kebebasan untuk mengelola serta meningkatkan sumber pendapatannya guna kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Saragih &

Siregar, 2020) . Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan suatu bentuk rancangan dalam keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kewenangan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas layanan dan mendorong peningkatan kesejahteraan umum di daerah tersebut (Akhmad, 2025).

Desentralisasi fiskal memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976) dalam (Periansya *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa komitmen antara principal dan agen. Disini agen ditujuk untuk diberi kewenangan melaksanakan tugas dari principal yang berhubungan dengan kekuatan pengambilan keputusan kepada agen. Jika terkait dengan pemerintah maka hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran guna melaksanakan tugas yang diberikan dari pemerintah pusat, salah satunya yaitu mengelola keuangan pemerintah secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 menyatakan bahwa semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam menjalankan otonomi direkap serta diatur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi kepala daerah. Serta APBD dibentuk berupa rencana kerja pemerintahan daerah serta dijelaskan dengan berupa belanja, pembiayaan dan pendapatan daerah yang diolah dengan sistem pengelolaan keuangan pada daerah (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Nordiawan dkk (2008:305), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) (Kartika, 2015). Menurut Rahayu, 2016 dalam (Saragih & Siregar, 2020) menyatakan bahwa kesuksesan pemerintah daerah pada terlaksananya kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Sularso & Restianto, 2011:114).

Kemajuan suatu daerah salah satunya dapat dipengaruhi dari segi pengaturan keuangan daerah yang benar dan baik. Kapabilitas dalam keuangan daerah yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi penentu dalam terciptanya pengaturan keuangan yang tepat. Keseluruhan penerimaan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai kemampuan fiskal daerah (Sartika & Pratama, 2019). PAD merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusinya terhadap APBD terbilang cukup besar, semakin besar nilai PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat menurut Sari et al, 2020 dalam (Saragih & Siregar, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akar pendapatan dari daerah yang didapatkan melalui retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah (Fadilah, 2017). Menurut Olatunji et al. (2009:54) dalam (Fadilah, 2017) menjelaskan bahwa penerimaan utama pemerintah daerah ialah bersumber dari pajak, PAD merupakan penopang yang dialokasikan guna kebutuhan fiskal daerah. Apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah besar, maka bantuan dana dari pemerintah pusat akan kecil, maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang (Periansya et al., 2021).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan kepada daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Fadilah, 2017). Pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan guna mengatasi kesenjangan fiskal yang terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah (Andriana, N. 2020). Menurut Nurdiwenty et al (2017:45) dalam (Fadilah, 2017) menjelaskan bahwa masing-masing daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda pada pendanaan pemerintahannya, dengan keadaan tersebut munculah perbedaan kapasitas keuangan di setiap daerah-daerah. Oleh sebab itu, guna mengurangi perbedaan kapasitas keuangan tersebut pemerintah menggelontorkan dana yang berasal dari APBN guna membantu memenuhi keperluan daerah dalam terlaksananya desentralisasi.

Selain sebagai alat penyeimbang keuangan antar pemerintahan, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong perekonomian di daerah tersebut yang nantinya dapat memberi dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi dengan melalui pendapatan asli daerah baik berupa retribusi, pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah (Andriana, N.2020).

Pemberian dana perimbangan ke pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah dan secara bertahap pemerintah daerah dapat mandiri untuk menutup pengeluarannya dengan pendapatan yang bersumber

dari pendapatan asli daerah (Andriana, N.2020). Penggunaan dana transfer suatu daerah yang lebih dominan dalam membiayai belanja dan kebutuhan pemerintah daerah, menunjukkan ketidaksiapan daerah dalam memaksimalkan potensi, sumber, dan kekayaan yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (Amalia & Haryanto, 2019).

Belanja modal merupakan salah satu bagian anggaran pengeluaran pemerintah. Belanja modal terbagi menjadi beberapa macam yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya (Saputra et al., 2021). Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang menjadi asset tetap daerah dan memiliki nilai guna diatas satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang telaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat (Islam, 2024).

Islam, (2024) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional melalui berbagai proyek sehingga produk domestik bruto meningkat sesuai dengan yang direncanakan. Aset tetap yang tercipta dari terlaksananya belanja modal menjadi ketentuan utama pada pemberian layanan publik oleh pemerintah daerah. Bertambahnya infrastruktur serta sarana prasarana yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut mencerminkan adanya realisasi belanja modal yang besar. Apabila suatu daerah berhasil membangun fasilitas infrastruktur pada daerahnya maka pertumbuhan ekonomi akan secara menerus bisa dicapai. (Saputra et al., 2021).

Adanya penambahan anggaran belanja pemerintah, terutama yaitu belanja modal harapannya bisa menciptakan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang

nantinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita. Dengan bertambahnya belanja modal juga dapat menjadi salah satu alasan munculnya beberapa investasi baru di daerah dalam penggunaan sumber daya secara optimal yang nantinya akan menambah nilai pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendapatan asli daerah (Saputra *et al.*, 2021).

Provinsi Jawa Timur memiliki total 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Ibukotanya adalah Surabaya. Menjadi provinsi terluas di pulau jawa dengan total luas 47.799,75  $km^2$  menjadikan Provinsi Jawa Timur terbentuk dengan beberapa kelompok wilayah yang salah satunya yaitu Eks Karesidenan Besuki. Wilayah tersebut terletak di bagian timur pulau jawa serta terdiri dari empat kabupaten diantaranya Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo (Ratnasari, G. T., *et al.*, 2019). Ratnasari, G. T., *et al.*, (2019) menyebutkan bahwa Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso masuk diantara 4 kabupaten tertinggal selain Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang yang berada di Jawa Timur pada tahun 2015-2019, hal tersebut berdasarkan Data Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015.

Wilayah eks-Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso dan Situbondo merupakan Kawasan yang secara geografis berdekatan, namun memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok dalam kinerja ekonominya. Ketimpangan ini tercermin dari variasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kualitas pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia antar kabupaten. Kabupaten Banyuwangi berkembang pesat dengan sektor pariwisata, pertanian dan industri kreatif begitu

juga Kabupaten Jember merupakan pusat pendidikan dan agribisnis, sedangkan pada Kabupaten Bondowoso relative tertinggal dengan hanya bergantung pada pertanian tradisional dan Kabupaten Situbondo kontribusi industrinya renda serta masih dominan sektor perikanan dan agraria.

Karesidenan Besuki memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan menarik untuk dijadikan topik penelitian skripsi karena kawasan ini merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang beragam, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM (Sukmawati, 2015). Sejarah panjang perkembangan frontir pertanian di Besuki sejak abad ke-19 menunjukkan bagaimana pertanian rakyat di wilayah ini mampu beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor, terutama tanaman padi yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat lokal (Setiawan, 2024). Selain itu, Besuki juga menghadapi tantangan kesenjangan pembangunan antar kabupaten, yang membuka peluang untuk analisis mendalam mengenai distribusi sumber daya, efektivitas pengelolaan anggaran, serta peran dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2025). Hal ini membuat Besuki sangat relevan untuk dikaji dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan optimalisasi potensi lokal (Pranata, 2022).

Jika dibandingkan dengan rumpun wilayah lain di Jawa Timur, Besuki menunjukkan dinamika yang berbeda. Misalnya, wilayah metropolitan seperti Surabaya didominasi oleh sektor industri dan jasa dengan PAD yang besar dan tingkat kemajuan ekonomi yang lebih tinggi, sementara wilayah pesisir seperti Madura lebih mengandalkan sektor perikanan dan tradisional (Iskandar, 2021). Wilayah lain seperti Madiun dan Malang memiliki fokus pada agribisnis dan

manufaktur berskala kecil dan menengah (Arifin, 2023). Karesidenan Besuki, dengan karakteristik campuran dan fokus pada pertanian rakyat serta pengembangan UMKM, menempati posisi strategis namun menghadapi tantangan yang khas, seperti efisiensi penggunaan belanja modal dan pengurangan kesenjangan antar daerah, yang tidak terlalu dominan di wilayah lain (Ramadhani, 2025). Perbandingan ini menjadikan Besuki sebagai wilayah dengan peluang riset yang potensial untuk memahami pembangunan ekonomi regional secara lebih inklusif dan komprehensif.

Menurut Todaro dan Smith (2015), daerah dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena mampu menahan guncangan sektoral dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang berbeda menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan fiskal antar wilayah yang berdekatan. Selain itu, perbedaan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah juga memperdalam ketimpangan ekonomi di Kawasan tersebut. Kabupaten Banyuwangi memiliki Bandara Blimbingsari, Pelabuhan Ketapang, serta jaringan jalan strategis yang menghubungkan dengan Bali dan Surabaya, sedangkan Bondowoso dan Situbondo belum memiliki akses transportasi yang memadai untuk mempercepat arus barang dan jasa. Barro (1991) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, daerah yang memiliki infratraktur lengkap dan aksesibilitas tinggi akan lebih mampu menarik investasi serta meningkatkan PAD dibandingkan daerah dengan konektivitas rendah.



Kapasitas fiskal daerah juga berperan penting dalam menciptakan ketimpangan fiskal. Kabupaten dengan basis ekonomi kuat seperti Banyuwangi dan Jember memiliki PAD yang lebih besar karena aktivitas ekonomi yang beragam dan intensitas pajak daerah yang tinggi. Sebaliknya, Bondowoso dan Situbondo masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Laporan *World Bank* (2021) tentang *Subnational Fiscal Disparities in Indonesia* menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sehingga menyebabkan daerah dengan PAD rendah sulit meningkatkan kemandirian fiskalnya. Kondisi ini memperkuat ketimpangan fiskal antar daerah di dalam satu kawasan.

Dari sisi sumber daya manusia, perbedaan tingkat pendidikan dan kualitas tenaga kerja juga berdampak pada produktivitas ekonomi daerah. Kabupaten Jember memiliki keunggulan komparatif dalam pendidikan dan penelitian melalui keberadaan Universitas Jember yang berperan dalam pengembangan agribisnis dan inovasi teknologi pertanian. Sementara itu, Bondowoso dan Situbondo menghadapi tantangan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih tergolong rendah. Becker (1993) menekankan bahwa investasi pada human capital berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, rendahnya kualitas SDM di beberapa daerah menjadi penghambat dalam optimalisasi penggunaan belanja modal dan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat.

Perbedaan dalam kualitas tata kelola pemerintahan juga turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola keuangan publik secara efisien. Banyuwangi dikenal memiliki tata kelola publik yang inovatif, seperti

penerapan smart kampung dan sistem e-government, yang meningkatkan transparansi fiskal dan efisiensi belanja daerah. Sebaliknya, daerah lain di eks-Karesidenan Besuki belum menunjukkan inovasi serupa dalam mengoptimalkan anggaran publik. Rodríguez-Pose (2013) menjelaskan bahwa kualitas institusi dan tata kelola daerah merupakan determinan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintahan yang efektif mampu mengalokasikan belanja modal secara produktif sehingga dapat meningkatkan PAD dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari total 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang diberikan kekuasaan secara luas serta diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan urusan pemerintah dari pemerintah pusat untuk dapat memberi pelayanan terhadap perkembangan daerah (Amalia & Pratiwi, 2022). Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas  $5.782,50 \text{ km}^2$  (BPK Prov. Jawa Timur).

Pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keseriusan upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bentuk APBD yang ada. Berikut tabel 1.1. di bawah yang menunjukkan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan pada periode tahun anggaran 2014-2024 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kab. Banyuwangi.

**Tabel 1.1 : Realisasi PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014-2024 (Dalam Bentuk Milyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan
2014	283,49	558,55	1.387,61
2015	346,99	699,42	1.494,32
2016	367,87	911,58	2.021,53
2017	388,94	657,07	2211,78
2018	450,07	480,38	2416,04
2019	495,69	529,54	2521,08
2020	482,74	553,39	2339,53
2021	520,02	661,1	2500,04
2022	516,75	679,24	2585,71
2023	567,75	843,58	2754,23
2024	597,54	527,98	2719,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2025)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi masih sangat kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang berarti ketergantungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pendapatan transfer juga tergolong tinggi. Pada realisasi belanja modal untuk tahun anggaran 2019-2023 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 315,6 milyar rupiah. Kenaikan PAD yang terlihat dalam 4 tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2021-2024 perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya.

Selanjutnya Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta merupakan pusat regional di kawasan timur daerah tapal kuda. Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah 226 desa dan 22 kelurahan (LPPD Kab. Jember, 6:2023). Dengan posisi dan letak yang strategis akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jember masih kurang dalam

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Berikut tabel 1.2 dibawah ini terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014-2024.

**Tabel 1.2 : Realisasi PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014-2024 (Dalam Bentuk Milyar Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan
2014	440	537	1.746
2015	461	556	1.917
2016	524	460	2.474
2017	719	708	2309
2018	598	532	2347
2019	667	731	2961
2020	593	188	2745
2021	635	552	2732
2022	640	829	3046
2023	764	232	3191
2024	774	270	2718

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2025)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember masih rendah dibanding dengan Dana Perimbangan yang didapatkan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember mengalami perubahan fluktuatif, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2018 yaitu senilai 120.77 Milyar Rupiah. Untuk alokasi belanja modal juga terlihat fluktuatif mulai dari tahun 2017-2023, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2023 ke 2024 sebesar 38,6 Milyar Rupiah.

Demikian juga kabupaten yang terletak sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi yaitu Kabupaten Situbondo (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim). Kabupaten yang juga termasuk dalam wilayah Eks Karesidenan Besuki ini memiliki wilayah dengan luas 1.638,50  $km^2$  dengan total 132 desa dan 4 kelurahan (BPS Kab. Situbondo, 2016). Sebagai

salah satu yang ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo memiliki Pendapatan Asli Daerah yang termasuk sangat kecil. Berikut tabel 1.3 terkait data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Kabupaten Situbondo pada tahun anggaran 2014-2024.

**Tabel 1.3 : Realisasi PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014-2024 (Dalam Bentuk Milyar Rupiah)**

Tahun	Pedapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan
2014	129,64	325,05	930,13
2015	148,51	340,68	973,54
2016	173,83	416,86	1.259,31
2017	228,52	345,38	1.202,43
2018	187,28	398,44	1.369,65
2019	204,72	354,7	1.369,73
2020	218,84	237,66	1.318,19
2021	228,76	217,51	1.319,57
2022	253,35	266	1.342,60
2023	238,76	288,5	1.323,23
2024	271,59	270,02	1.395,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo (2025)

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Peran serta pemerintah pusat dalam menyumbang untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah masih terbilang sangat tinggi. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbodo terlihat mulai dari tahun anggaran 2019-2024 dan perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan guna menunjang kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Situbondo. Pada realisasi belanja modal juga masih fluktuatif hingga pada 2024 telah mengalami penurunan 22,88 Milyar Rupiah dibandingkan pada tahun 2023.

Kabupaten tertinggal berikutnya yaitu Kabupaten Bondowoso, kabupaten yang memiliki 23 Kecamatan dengan total 10 kelurahan dan 209 desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 1.525,97  $km^2$  (Wikipedia.org, Diakses pada 01 Agustus 2025). Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso terus berusaha untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk pembangunan pada sektor ekonomi maupun sektor lainnya, tentu saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengambil peran yang sangat penting (Darmayanti, Y.A, 2024). Telah disajikan tabel 1.4 dibawah tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Kabupaten Bondowoso yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 1.4 : Realisasi PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014-2024 (Dalam Bentuk Milyar Rupiah)**

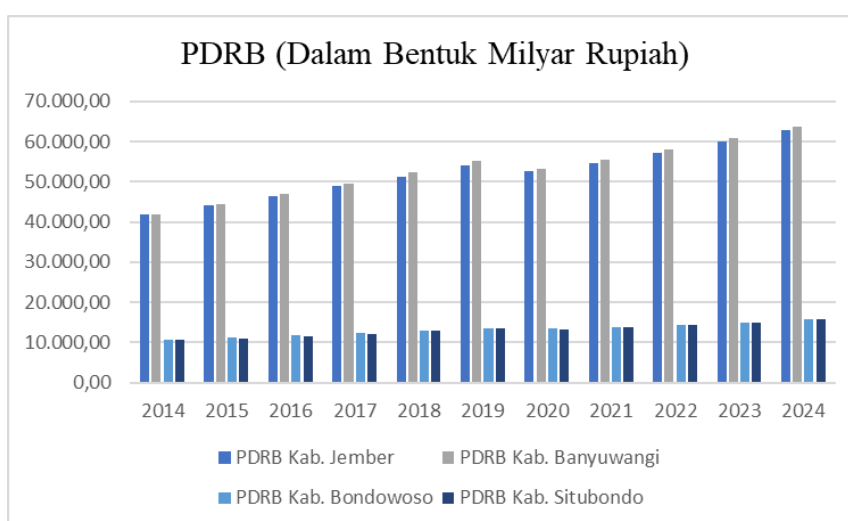
Tahun	Pedapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Dana Perimbangan
2014	134,68	311,5	979,34
2015	158,97	404,58	1.051,59
2016	177,03	425,43	1.440,27
2017	229,15	383,57	1.484,98
2018	203,24	284,8	1.557,69
2019	218,54	385,56	1.673,10
2020	222,66	227,25	1.520,18
2021	223,14	196,55	1.597,52
2022	189,50	190,4	1.537,30
2023	200,99	168,47	1.531,37
2024	207,62	96,19	1.381,89

Sumber : DJPK Kementrian Keuangan RI (2025)

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso masih sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran Kabupaten Bondowoso masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso dalam 2 tahun anggaran terakhir yaitu pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan dan harus dipertankan serta ditingkatkan untuk perolehan tersebut. Pada realisasi belanja modal mengalami nilai yang fluktuatif pada setiap tahunnya mulai dari 2017-2019.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Fadilah, 2017). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan perkapita dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), salah satu pengukuran yang berdasarkan total nilai barang dan jasa yang ada di daerah atau lokal. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang ada di daerah, biasanya makin tinggi pertumbuhan ekonomi pemerintah akan memperbaiki peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut (Saputra et al., 2021). Berikut merupakan data PDRB wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2014-2024.



Gambar 1.0-1 : Grafik PDRB wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2014-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025)

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan PDRB besar bukan berarti tidak mempunyai permasalahan di dalam wilayahnya. Salah satunya pada wilayah eks karesidenan besuki yang meskipun saling berbatasan antar wilayah satu sama lain, akan tetapi nilai Produk Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten berbeda jumlahnya. Berdasarkan grafik tersebut terlihat ketimpangan pada penerimaan PDRB Kabupaten Banyuwangi dan Jember yang jauh lebih banyak dari pada penerimaan PDRB Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Secara keseluruhan, ketimpangan fiskal di wilayah eks-Karesidenan Besuki merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, meliputi struktur ekonomi yang tidak seimbang, perbedaan infrastruktur, kapasitas fiskal, kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan PAD sebagai variabel intervening menjadi relevan, mengingat PAD berperan penting sebagai indikator kemandirian fiskal daerah yang dapat memperkuat pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengambil topik “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening”



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui variabel intervening Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?
5. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui variabel intervening Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?
6. Apakah Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo) ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui variabel intervening Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui variabel intervening Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks. Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).
6. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo).

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada empat kabupaten di wilayah eks karesidenan besuki yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo. Periode pengamatan mulai dari tahun anggaran 2014 hingga 2024. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber resmi terkait melalui pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data panel.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Situbondo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran terkait pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah atau menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai realisasi keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Situbondo.

3. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan realisasi keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian lebih lanjut.